BAB III

SIKAP TURKI TERHADAP ETNIS ROHINGYA

Etnis Rohingya merupakan salah satu Etnis yang paling tertindas di dunia menurut data dari PBB mereka dipelakukan secara tidak manusiawi, di usir dari tempat tinggalnya, diperkosa, hingga dibantai. Keberadaannya yang hidup di Myanmar membuat kesejahteraanya kurang terjamin, karena Etnis Rohingya dianggap oleh pemerintahan Myanmar bukan salah satu Etnis yang masuk dalam negara Myanmar setelah negara tersebut merdeka, kehadiran mereka dianggap sebagai imigran gelap, maka tidak ada kewajiban pemerintah Myanmar untuk mengakui sebuah kewarganegaraan Rohinyga.

A. Sejarah konflik Etnis Rohingya di Myanmar

Rohingya merupakan sebuah Etnis yang tinggal dan hidup didalam Negara Myanmar. Pada zaman kuno, negara bagian Rakhine dikenal dengan nama Rohang dan sebutan untuk orang-orang yang tinggal di daerah tersebut terkenal dengan panggilan “Rooinga” atau “Rohingya”. Pemimpin Rohingya yang bernama Abu Tahay dan sekaligus merupakan seorang politis di Partai Pembangunan Uni Nasional, di dalam tulisannya *“Rohingya Belong to Arakan and Then Burma and So Do Participate”,* Abu Tahay menyebutkan Etnis Rohingya bermula ketika masyarakat kuno keturunan Indo-Arya yang menetap di Arakan memutuskan untuk memeluk Islam pada abad ke-8, pada generasi selanjutnya mereka mewarisi campuran Arab (788-801), Persia (700-1500), Bengali (1400-1736) dan Mughal (abad ke 16), syiar Islam mencapai Arakan

sebelum 788 Masehi kemudian agama ini mampu menarik hati masyarakat lokal Arakan dan mendorong mereka untuk memeluk Islam secara massal.

Sensus yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris di Burma pada 1826, 1872, 1911 dan 1941 menyebutkan bahwasanya masyarakat Rohingya diidentifikasi sebagai Muslim Arakan dan merupakan salah satu ras asli Burma. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Lembaga SIL Internasional dan Universitas Oxford juga menguatkan sebuah fakta sejarah bahwa Rohingya merupakan asli ras pribumi Rakhine yang sekarang menjadi bagian dari Myanmar. (Jamil & Nashrullah)

Tahun 1826 ketika kerajaan Inggris menguasai daerah Rakhine setelah perang Anglo-Burmese, hal yang pertama di lakukan oleh pemerintahan Inggris yaitu melakukan sensus penduduk untuk mendata jumlah penduduk. Suku-suku dan agama yang ada di Burma, hasil dari beberapa sensus yang dilakukan tidak ada yang mengidentifikasi diri mereka sebagai suku atau etnis Rohingya. Etnis India yang ada di Burma pada saat itu dijuluki Hindu jika mereka beragama Hindu dan Mohamedans jika mereka memeluk agama Islam dan mereka yang berasal dari bengal disebut Chittagonians atau Bengalis.

Istilah Rohingya mulai muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II ketika Burma menjadi negara yang merdeka di tahun 1948. Bengalis yang tinggal di daerah Butheetaung dan Maungdawdi Rakhine Utara mulai mempopulerkan istilah Rohingya. Istilah ini mulai di cetak pada sebuah artikel *"The Sudeteen Muslims"* pada 20 Agustus 1951 yang ditulis oleh Abdul Gaffer, istilah ini digunakan sebagai identitas untuk memperjuangkan hak-hak rakyat muslim di

parlemen atau pemerintahan, Kelompok ini ingin memperkuat identitas mereka dan ingin menjadikan wilayah Rakhine sebagai wilayah Islam. Pada mulanya mereka ingin Rakhine Utara ini dianeksasi oleh Bangladesh sebagai negara Islam, akan tetapi pemerintah Bangladesh tidak mau melakukan aneksasi.

Kemudian keinginan pejuang Rohingya mendirikan sebuah daerah Istimewa tetapi keinginan ini juga tidak dipenuhi oleh pemerintahan Burma yang akhirnya kelompok pejuang ini berubah menjadi organisasi pemberontak bersenjata *(The Mujaheeds).* Mereka menyerukan sebuah perlawanan terhadap pemerintahan Burma, namun pada tahun 1961 pemberontakan dapat ditumpas ketika pemimpin pemberontakan menyerahkan diri kepada militer Burma dan berlanjut sebuah operasi imigran gelap tahun 1978 oleh pemerintahan Burma yang bertujuan untuk membasmi anggota dan simpatisan gerakan Mujaheedin, akibat operasi ini banyak rakyat muslim yang terbunuh dan dipenjara. Sebagian dari mereka melarikan diri ke perbatasan Bangladesh dan kemudian sisahnya ikut bergabung kedalam gerakan pemberontakan lainnya. Stigma Rohingya mempersulit generasi mendatang dikarenakan adanya pemberontakan di masa lampau menyebabkan masalah ini masih berlanjut hingga sekarang. (Arief, 2016)

Pada masa pemerintahan Jendral Ne Win, diberlakukan sebuah UU Kewarganegaraan tahun 1982, dalam UU kewarganegaraan tersebut pemerintahan Jendral Ne Win menganggap etnis Rohingya bukan etnis asli pribumi di Myanmar melainkan etnis pendatang, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis yang diakui, namun warga Rohingya etnis bengali

tidak tercatat didalamnya, pemerintah Myanmar mengklaim bahwa Rohingya tidak memenuhi syarat untuk mendapat kewarganegaraan di bawah UU Kewarganegaraan yang disusun militer pada 1982. Dokumen tersebut mendefinisikan bahwa warga negara adalah kelompok etnik yang secara permanen telah menetap dalam batas-batas modern Myanmar sebelum tahun 1823 dan merupakan tahun sebelum terjadi perang pertama antara Inggris-Myanmar. Selama diterapkannya UU Kewarganegaraan 1982 dan tidak memiliki dokumen legal untuk membuktikan garis keturunan mereka maka sedikit harapan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan tersebut. (Ferida, Liputan 6, 2016)

Pada 3 Juni 2012 warga Rakhine bekerjasama dengan militer Burma, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 muslim Myanmar yang dalam perjalanan pulang dari Thandwe ke Mandalay dalam rangka perjalanan da'wah Jama'ah Tabligh; disinyalir ini adalah balas dendam yang berlebihan dan sistematis terhadap kasus perkosaan yang melibatkan dua Pria muslim dan satu Pria Buddhist terhadap seorang gadis Rakhine Buddhist, yang kebenarannya juga masih dipertanyakan. Kekerasan di atas adalah bagian dari perencanaan dan serangan yang sistematis yang didesain untuk memusnahkan populasi Rohingya yang tersisa di Arakan dan menjadikan Arakan sebagai *"muslim-free region".* Jam malam dan pembatasan gerak ini diberlakukan di Arakan Utara selama dua bulan, tapi hanya berlaku untuk warga Muslim. Tidak untuk warga Rakhine. Angkatan bersenjata hampir semua adalah Rakhine atau pro dengan Rakhine.

Pada masa rezim Thein Sein juga menolak memberikan kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya, dan di rezim ini justru kondisi Rohingya semakin buruk dikarenakan Thein Sein memasukkan Rohingya kedalam *Blacklist*. Padahal keinginan dari etnis Rohingya adalah mendapat pengakuan dari Myanmar, agar aktifitas mereka bisa bebas tanpa harus mendapat tekanan dari pemerintah dan hidup tanpa ada rasa ketakutan untuk dibantai dan diusir didalam negeri. (Nuswanto, 2012)

Dan ini ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar Thein Sein pada tanggal 29 juli 2012 dengan mengatakan bahwa Etnis Rohingya tidak mungkin menjadi bagian dari kewarganegaraan Myanmar karena merupakan Imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh dan menganggap kelompok ini bukan dari bagian dari Myanmar sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. (Hartati, 2013, hal. 8)

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor kekerasan yang menyebabkan kekerasan konflik di Myanmar :

1. Tindakan yang dilakukan Junta Militer cenderung represif yang kemudian menjadikan rasa aman semakin terabaikan bagi masyarakat sipil, mereka mengalami ketakutan karena lembaga Militer yang di landasi oleh kebijakan politik yang otoriter, sehingga tidak mampu menjamin keselamatan individu yang sedang berkonflik. Seharusnya sebuah pemerintah harus mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama didalam negaranya. (Hartati, 2013, hal. 8-9) Akan tetapi keberpihakan militer terhadap warga Rakhine yang beragama buddha

untuk mengusir Muslim di Arakan justru memperkeruh suasana. Setiap masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam negara mengharapkan agar pemerintah menyediakan keamanan dan stabilitas ekonomi, sehingga bisa mencipatkan kondisi yang kondusif dan aman untuk masyarakat.

2. Adanya perdebatan sejarah tentang kedatangan Etnis Rohingya di mana pemerintahan yang mengklaim bahwasanya Etnis Rohingya bukan merupakan Etnis asli Myanmar sejak merdekanya negara tersebut di tahun 1948 melainkan pendatang, di lain sisi para peneliti dan juga pemimimpin Rohingya yang bernama Abu Tahay mengklaim bahwa Etnis ini adalah penduduk asli Myanmar.

3. Adanya faktor balas dendam yang berlebihan terhadap kasus pemerkosaan Ma Thida Htwe, dia merupakan seorang gadis yang bekerja sebagai tukang jahit. Pemerkosaan ini dilakukan oleh Etnis Rohingya yang bernama Rawshi bin Ukyaw Thaung, Rawphi bin Sweyuk Tamauk dan Khochi bin Akwechay. Kemudian aparat polisi menangkap mereka secara tidak transparan sehingga dari kedua belah Etnis marah dan menyebabkan kerusuhan antara kedua belah kubu, tetapi dalam kerusuhan ini aparat terlihat membela Etnis Rakhine dengan menangkap warga Rohingya dengan tuduhan membuat kerusuhan di wilayah Rakhine dengan melanggar UU 148/506 dan menangkap 168 warga Rohingya yang kemudian dipenjarakan di penjara Buthidaung tanpa proses hukum yang transparan. (Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar, hal. 7)

B. Bantuan yang diberikan Turki untuk Rohingya dari tahun 2012-2016

Usaha Turki untuk membantu Etnis Rohingya terbilang luar biasa, ini juga merupakan salah satu peluang mereka untuk membuktikan tidak hanya sekedar berbicara terkait isu-isu kemanusiaan atau hak asasi manusia namun adanya tindakan untuk membantu terhadap mereka yang mendapat diskriminasi terkait hak asasi manusia. Tentunya masalah ini tidak hanya sebagai tanggung jawab oleh Turki sendiri, akan tetapi merupakan kewajiban bersama di mata internasional untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, maka dari itu pemerintahan Turki mencarikan solusi dan sebuah bantuan tidak hanya berasal dari pemerintah saja, akan tetapi Turki juga bekerja sama dengan lembaga internasional maupun NGO didalam negeri, adapun bantuan-bantuan yang diberikan yaitu :

1. Bantuan Turki kepada Rohingya melalui pemerintah

Terjadi kerusuhan di Myanmar pada bulan juni 2012 yang kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa di kanca internasional, salah satunya negara Turki memberikan perhatiannya terhadap Etnis tersebut. Pemerintahan Turki melalui Mentri Luar Negeri Ahmet Davutoglu datang pada tanggal 8 Agustus 2012 untuk memberikan bantuannya terhadap etnis muslim Rohingya sebesar 3,4 juta lira. Pemerintah Turki juga mengirimkan delegasinya menuju kamp pengungsian untuk memberikan bantuan langsung berupa makanan untuk Rohingya yang dipimpin oleh istri Perdana Menteri yaitu Emine. (Hurriyet Daily News, 2012)

Setelah mengunjungi kamp pengusian warga muslim, Ahmet Davutoglu beserta rombongannya juga mendatangi kamp pengungsi yang beragama Buddha,

mereka juga memberikan sebuah paket bantuan. Davutoglu menyatakan bahwa semua orang mempunya hak yang sama dan ia berharap dapat melihat warga Muslim dan buddhis mampu hidup berdampingan dengan damai. beliau menegaskan bahwa Turki akan terus memberikan bantuannya kepada masyarakat pengungsi di Myanmar dan Davutoglu menekankan pentingnnya memberikan hak kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya. (Agency, Hurriyet Daily News, 2013)

Pada tanggal 2 November 2012 bantuan selanjutnya yang akan diberikan oleh pemerintahan Turki adalah membangun tiga rumah sakit darurat untuk umat muslim yang berada di kamp kota Sittwe, namun ketiga rumah sakit tidak sepenuhnya untuk digunakan umat muslim, satu rumah sakit akan dibangun dekat dengan kamp umat muslim, satu lagi di kamp umat Buddha dan yang terakhir akan didirikan di pusat kota Sittwe. Pemerintahan Myanmar untuk pertama kalinya memberikan izin kepada dokter asing untuk memberikan pelayan medis. Pemerintahan kesehatan Myanmar bekerja sama dengan menteri kesehatan dari Turki dan juga dokter dari seluruh dunia, masing-masing rumah sakit akan ditempatkan sepuluh dokter dan juga lima ambulan untuk Myanmar, tiga diantaranya dipergunakan untuk umat Buddha dan dua ambulan dipergunakan untuk Muslim. (Qomariah, 2012)

Pada 19 Mei 2015 dalam pertemuan di istana Cankaya, Perdana Menteri Ahmet Davutoglu berjanji akan membantu dan mencari pengungsi Rohingya yang berlayar di lautan lepas dan tetap menjaga keamanan mereka, pemerintah bekerjasama dengan Organisasi Internsional untuk migrasi (IOM) dan angkatan laut dengan menggunakan peralatan kapal bersenjata milik angkatan laut,

pemerintahan Turki mencari pengungsi ke Thailand, Malaysia hingga ke Indonesia mereka memperkirakan para pengungsi akan terdampar hingga ke perairan tersebut. Bahkan Presiden Recep Tayyep Erdogan juga menghubungi Perdana Mentri Malaysia Najib Razak terkait masalah Rohingya, beliau menyampaikan pengungsi yang berada hingga semenanjung di Asia Tenggara akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Turki. (Iman, 2015)

Kedatangan Rohingya yang menggunakan perahu layar dengan tujuan mencari tempat berlabuh dan perlindungan ini awalnya mendapat respon yang kurang baik karena sejumlah negara seperti Indonesa, Malaysia dan Thailand menolak kedatangan pengungsi Rohingya, masing-masing memiliki alasannya tersendiri untuk menolak. Negara Malaysia menolak di karenakan jumlah yang datang sangat banyak jumlahnya hingga ribuan. (Indah, 2015) Tan Kok Kwee yang merupakan laksamana utama lembaga penegak maritim Malaysia mengatakan : “Kami tidak akan membiarkan kapal asing masuk kecuali jika kapal yang mereka tumpangi terancam tenggelam maka angkatan laut Malaysia akan mengirimkan bantuan dan mengirim mereka pergi.” (Patnistik, 2015)

Thailand juga negara yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya, negara tersebut tidak ingin kehadiran pengungsi di Thailand Pernyataan tersebut di lontarkan langsung oleh Perdana Menteri Thailand yaitu Prayuth Chan Ocha, alasannya adalah karena negaranya tidak mampu menampung semua pengungsi Rohingya yang datang karena masalah biaya, kemudian menurutnya “jika kami menampung mereka, lalu siapa lagi yang akan datang secara bebas ke negara

kami”. Beliau juga mengatakan : “Dari mana kami akan mendapatkan dana untuk menampung mereka semua”. (Tuwo, 2015)

Sama halnya dengan Indonesia sempat menolak pengungsi Rohingya, Pernyataan penolakan juga muncul dari Juru Bicara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), Fuad Basya yang tidak memberikan ijin masuk untuk kapal asing untuk berlabuh diperairan Indonesia. Setelah sebelumnya sempat ditolak kehadirannya di Indonesia, akhirnya melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyetujui pihaknya untuk menerima para imigran. Dalam kebijakan tersebut tercapai setelah diadakan pertemuan dari perwakilan tiap-tiap negara bersama dengan dua negara lain seperti Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Indonesia juga menerangkan siap membangun tempat penampungan sementara untuk satu tahun bagi para pengungsi, setelah negara yang sempat menolak Rohingya kemudian mereka bersedia menerima kedatangan Pengungsi tersebut pembahasan terkait penerimaan pengungsi yang datang di tahun 2015 ini kemudian diberi apresiasi oleh sejumlah lembaga seperti PBB dan UNHCR di Jenewa. (Pasuhuk, 2015)

Di Tahun 2016 Turki memberikan tawaran kepada Indonesia dan Malaysia untuk membangun permukiman sementara layak huni untuk Etnis Rohingya. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam pertemuan ke-42 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Kuwait mengatakan *“Turkey will help the two countries about building settlement centers and provide material and technical support for infrastructure”.* (Febriar, 2016, hal. 64)

Selanjutnya pada bulan Juni 2016, kedatangan Mentri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu ke Myanmar bertujuan untuk mengadakan pertemuan dengan Perdana Mentri Aung San Suu Kyi, kedatangan Turki adalah untuk membahas Etnis Rohingya dan kemudian menawarkan bantuan tidak hanya dikalangan warga Muslim saja akan tetapi juga keberbagai Etnis yang berada di Rakhine dan kemudian juga menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan lembaga Turki tidak membedakan kelompok masyarakat yang berada di daerah konflik, Cavusoglu mengatakan : "Kami akan aktif menjangkau semua daerah yang membutuhkan, membuat jalan dan membuka klinik kesehatan di seluruh negeri, Perbedaan antara kami dan negara-negara lain adalah bahwa kami tidak memaksakan proyek, bahkan kami meminta proyek dari pemerintah pusat dan daerah, Pihak berwenang di negara ini tahu apa yang dibutuhkan lebih baik dari kami, itulah sebabnya kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini". Dengan dibukannya kedutaan besar antara Turki-Myanmar dalam empat tahun terakhir Turki telah meningkatkan bantuan kemanusiaan, memberikan kontribusi $ 13.000.000 terhadap sektor kesehatan dan pendidikan. (Agency, Middle East Updat, 2016)

Aung San Suu Kyi menegaskan, terjadinya konflik di daerah miskin ini juga karena dipicu persoalan ekonomi, untuk itu agar mendorong perekonomian di daerah yang berkonflik tersebut harus adanya investor guna untuk memajukan perekonomiannya dan Partai NLD berharap jika perekonomiannya mulai maju berharap adanya rekonsiliasi antara warga Buddha dan Muslim yang berkonflik. Maka dari itu kedatangan Turki ke Myanmar untuk mengadakan sebuah

kerjasama dan siap mendukung setiap kebutuhan yang diperlukan, kemudian berharap dapat menciptakan sebuah perdamaian, harmoni dan stabilitasm. Turki telah mengatakan kepada orang-orang di sini bahwa Turki siap mendukung mereka melalui bantuan kemanusiaan dan hak advokasi. Turki juga menawarkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan negara dan terkait soal isu seperti kewarganegaraan telah di tindak lanjuti. (JurnalIslam.com, 2016)

Itikad baik dan bantuan Turki ini mendapat respon dari Aung San Suu Kyi, ia mengucapakan terimakasih kepada Menlu Turki atas kepedulian dari pemerintahan Turki selama kunjungan di Myanmar, Turki juga sudah banyak memberikan bantuan terhadap negaranya. Aung San Suu Kyi juga menambahkan "Saya berterima kasih padanya (Cavusoglu) untuk upaya yang dilakukan dan kepekaan dalam menemukan solusi untuk situasi di Rakhine. Saya berharap masyarakat internasional akan memperlakukan kasus ini dengan sensitivitas yang sama, dan membantu kami maju dalam mencari solusi. (Agency, Middle East Updat, 2016)

Aung San Suu Kyi merupakan tokoh yang terkenal di Myanmar, beliau merupakan tokoh yang mendapatkan Nobel perdamaian pada tahun 1991. (Ferida, Liputan 6, 2016) Karena Keberhasilannya dalam memajukan demokrasi di Myanmar tanpa harus menggunakan kekerasan dan menentang rezim militer serta memperjuangkan hak asasi manusia, banyak yang berharap terhadap sosok beliau di pemerintahan Myanmar agar membantu mencarikan solusi.

Aung San Suu Kyi yang berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi, menang telak dalam pemilihan November 2015, mengantarkan pemerintahan sipil

pertama negara itu setelah 54 tahun dikuasai militer. Namun, kemenangan partainya tidak mampu menjadi Aung San Suu Kyi menjadi presiden karena klausul dalam konstitusi yang melarang siapa pun yang memiliki pasangan atau anak keturunan warga asing menjadi presiden. Untuk menyiasati klausul itu, Suu Kyi memilih teman kepercayaan lamanya yaitu Htin Kyaw, yang dipercaya untuk menjadi presiden sebagai penggantinya. Kemudian salah satu tindakan pertama pemerintahan Kyaw setelah mengambil kekuasaan yaitu memberikan Aung San Suu Kyi posisi yang baru dibuat. Posisi itu disebut penasihat negara yang mirip dengan peran perdana menteri. (Tempo.co, 2016)

Setelah partai demokrasi yang di usungnya menang, Aung San Suu Kyi malah terkesan diam terkait persoalan Rohingya, tentunya tindakan seperti ini mendapat kecaman, mereka menuntut hak-hak asasi Rohingya agar bisa diperjuangkan, kecaman yang didapat dari internasional tentunya memberikan tekanan kepada Aung San Suu Kyi terkait masalah Rohingya. (Agency, Middle East Updat, 2016)) meski dihadapi dilema dan tekanan Aung San Suu Kyi berjanji mendorong amandemen konstitusi guna membangun sebuah demokrasi sejati setelah beberapa dekade dikontrol militer. Aung San Suu Kyi mengatakan : “Kebijakan dan prinsip kami adalah untuk memastikan rekonsiliasi nasional, perdamaian internal, aturan hukum, dan menjaga sistem demokrasi yang dinamis. Kita perlu amandemen konstitusi.” Namun upayanya untuk mengubah masih mendapat perlawanan dari pihak militer. Dalam kabinet, militer menguasai Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, dan Departemen Urusan Perbatasan. Selain 25 persen kursi di parlemen untuk perwira militer, kelompok

ini diperkirakan akan membuat pemerintah tidak mengubah konstitusi tanpa persetujuan militer. (Tempo.co, 2016)

Setelah mendapat banyak protes dari berbagai kalangan, Aung San Suu Kyi merespon kekecewaan publik kepada dirinya yang dianggap tidak membelah hak asasi manusia di negaranya, pada pidato sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke 71 di New York Aung San Suu Kyi membicarakan permasalahan terkait pembantaian yang ada di Rakhine, beliau berjanji akan memihak umat Muslim Rohingya dan ingin mencarikan sebuah solusi terhadap Rohingya dan menegakkan hak asasi manusia dalam masalah Rohingya di Rakhine, Aung San Suu Kyi mengatakan " Kami berkomitmen pada solusi berkelanjutan yang akan menggiring menuju perdamaian, Stabilitas dan pembangunan untuk semua kelompok masyarakat". (Binar, 2016)

Kepala Direktorat urusan agama Turki yaitu Mehmet Gormez juga meminta perhatian dunia kepada Rohingya ia menyampaikan bahwa isu terkait Rohingya jangan sampai diabaikan, karena ia tidak ingin warga Rohingya jadi bayangan penderitaan Muslim lain, seperti yang terjadi di Suriah. apa yang terjadi di Myanmar dan menimpa warga Rohingya merupakan tugas dari seluruh dunia, untuk bisa mengakhiri penindasan yang terus terjadi. Gormez mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), agar terus berusaha membantu penyelesaian dengan dijadikan masalah utama. OKI sejak berdiri pada 1969, sudah memiliki setidaknya 57 negara anggota dan seharusnya menjadi Organisasi Internasional yang memiliki kekuatan, terutama melindungi kepentingan dunia Islam. Hal itu

harus dilakukan dengan semangat mempromosikan perdamaian dan harmonisasi dunia. (Suryana & Firmansyah, 2016)

2. **Bantuan Turki melalui lembaga internasional Organisasi Kerjasama Islam (OKI)**

Untuk menyelesaikan masalah ini Turki tidak hanya bekerja sendiri akan tetapi dibantu oleh lembaga internasional salah satunya OKI. Turki bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Myanmar. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu :

> *"The OIC head, myself and other friends have expressed [to Myanmar top officials] that we appreciate the new democracy experience of Myanmar and the latest reforms the country introduced in this regard. However, we [told them] that as this situation of Rohingya Muslims has been deteriorating, not improving, since our visit to the country in 2012, precautions should swiftly be taken to improve the situation. We underlined that the OIC is ready to offer all kinds of support and I proposed the layout of an action plan to the OIC head [in this regard]"*

Pernyataan yang diungkapkan oleh Davutoglu mengindikasikan komitmen Turki bersama dengan Organisasi Kerja Sama Islam untuk memberikan bantuan terhadap etnis nuslim Rohingya dan menyatakan siap untuk menyusun rencana-rencana pemberian bantuan. (Febriar, 2016, hal. 69)

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) merupakan organisasi antar pemerintah yang di miliki oleh umat Islam secara global, dan ini juga merupakan

khas agama Islam yang sangat menekankan adanya *Ukhuwah* Islamiyah di antara sesama mereka, manfaat dan implikasi dari semangat ukhuwah itu tidak hanya untuk umat islam di dunia tetapi juga masa depan peradaban dunia secara keseluruhan. OKI merupakan organisasi antar pemerintah terbesar setelah PBB yang berbasis Islam, memiliki anggota berjumlah 57 negara yang tersebar di empat benua. Organisasi ini didirikan sebagai akibat dari pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dibentuk dalam keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah atau 25 September 1969. (Dewinta, 2016, hal. 128)

Tujuan dibentuknya OKI yaitu : 1) Meningkatkan solidaritas Islam antar anggotanya. 2) berusaha menghapuskan perbedaan rasial, kolonialisme dalam segala benttuk dan manifestasinya, serta masalah diskriminasi. 3) mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Islam. 4) membendung dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak serta tanah airnya. 5) Memperteguh perjuangan islam dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka. (Sopiana, 2016)

Turki melalui OKI bersama dengan negara anggota lainnya terus berupaya untuk membantu Etnis Rohingya, Pada tahun 2012 pemerintah Myanmar mengizinkan masuknya OKI serta organisasi internasional lainnya seperti PMI (Palang Merah Indonesia) dan Bulan Sabit Merah. OKI dan PMI sudah membangun 4000 rumah sebagai tempat tinggal warga muslim Rohingya. Jusuf Kalla (Ketua PMI) mengatakan komitmen ini baru setengah dari jumlah kebutuhan rumah untuk pengungsi Rohingya karena dari perhitungan mereka

sedikitnya dibutuhkan 8000 rumah. Rumah yang akan dibangun ini untuk mengganti rumah mereka yang dibakar saat terjadinya kerusuhan. (Eko/Ary, 2012)

Pada 14-15 Agustus 2012, KTT Luar Biasa OKI dilaksanakan di Mekkah, Arab Saudi. Dalam KTT ini, OIC *Contact Group* telah diresmikan dan melaksanakan tugasnya untuk mencari dan menggali informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi di Myanmar. Selain itu, KTT ini menghasilkan Resolusi 3/4-EX (IS) untuk masalah etnis Rohingya di Myanmar dan menyepakati *Final Communique* yang memuat tentang sumbangan dari Raja Abdullah sebesar 50 juta US$ untuk membantu etnis Rohingya. Dalam tahap ini, OIC *Contact Group* melakukan misinya dengan mencari informasi yang terpercaya dan melakukan kunjungan pada 5 sampai 15 September 2012 ke Myanmar dan bertemu dengan Menteri Urusan Perbatasan serta Gubernur Arakan. OIC Contact Group melaporkan hasil dari perjalanan mereka pada 28 September 2012 dalam pertemuan koordinasi tahunan Menteri Luar Negeri OKI di Markas Besar PBB, New York. Dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal OKI menjelaskan perkembangan di Myanmar dan situasi di Arakan.

Pada 14-16 November 2013, OKI bersama 7 negara anggota lainnya yakni, Indonesia, Bangladesh, Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Turki, dan Djibouti melakukan kunjungan selama tiga hari ke Myanmar termasuk Arakan. Dalam kunjungan kali ini, OKI beserta negara anggota lainnya melakukan pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, Para menteri, pemimpin masyarakat Rakhine, pemimpin Rohingya serta badan-badan PBB. Mereka memulai dialog dan

bertukar pendapat tentang konflik di Arakan, OKI memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan kisah mereka masing-masing. Tujuan dilakukannya pertemuan ini, untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan memperkuat kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. (Juniar, 2014, hal. 900-901)

Bantuan dari OKI tidak hanya mementingkan negara-negara anggotanya saja, namun negara yang bukan merupakan anggotanya juga mendapatkan perhatian dari OKI. Resolution OIC/CFM-39/2012/MM/RES/FINAL tentang *Muslim Communities and Minorities in-Non* OIC *Member State* berisi mengenai kaum muslim yang terdiskriminasi di negara-negara bukan anggota OKI termasuk Myanmar. Isi pada resolusi no. 1/39-MM tentang *Safeguarding The Rights of Muslim Communities* and Minorities in Non OIC Member State sebagai berikut ; menyerukan kepada negara-negara anggota untuk memberikan bantuan kepada masyarakat muslim minoritas di negara-negara non anggota dan berkontribusi pada penyelesaian masalah mereka melalui kerjasama dengan pemerintah negara-negara tersebut.

Dalam menangani kasus Etnis Rohinya, OKI mendesak anggotanya dan masyarakat interrnasional untuk meminta kepada pemerintahan Myanmar mencegah kekerasan yang terjadi. Sekjen OKI bersama anggotanya juga menggunakan diplomasinya masing-masing untuk meminta pemerintahan Myanmar segera menyelesaikan konflik tersebut. Sekretaris Jenderal OKI periode 2005-2013. Dia juga menyatakan bahwa OKI siap bersedia untuk memberikan dukungan atau apapun yang diperlukan untuk memperbaiki situasi umat Islam di

Myanmar. Ihsanoglu meminta ke PBB untuk mengirimkan utusannya ke Myanmar. (Dewinta, 2016, hal. 129-130)

Sekjen OKI berupaya keras di tingkat global, untuk menekan Myanmar agar mengambil tindakan mengakhiri penderitaan etnis Rohingya. Upaya-upaya itu sedang dilakukan lewat kantor OKI di Jenewa, New York dan Brussels guna memfasilitasi dunia internasional mengintervensi Myanmar dalam masalah tersebut. OKI sedang berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan HAM, PBB, Uni Eropa dan organisasi internasional lainnya diantaranya ASEAN, untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Delegasi OKI juga melakukan pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Antar agama yang beranggotakan perwakilan dari 4 agama; Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Mereka saling bertukar pandangan tentang akar masalah dan konflik antara Muslim dan Budhis di Arakan, serta bagaimana cara membangun kepercayaan dan harmoni di antara kedua komunitas itu. (Wijaya, 2016)

Pada tahun 2016 selama bulan Ramadhan lebih dari 1.100 keluarga Rohingya yang tinggal di Sittwe negara bagian Rakhine yang mengungsi menerima bantuan pangan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI melalui organisasi Non-pemerintah HUMANiTi Malaysia mendistribusikan lebih dari 550 karung beras. Bantuan tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal OKI Iyad Ameen Madani untuk memastikan kebutuhan dasar dan jasa, termasuk medis dan pendidikan disediakan untuk pengungsi Rohingya.

Dr Syed Hamid Albar yang merupakan presiden HUMANiTi Malaysia dan Utusan Khusus OKI untuk Myanmar mengatakan bahwa OKI telah bertekad untuk membantu para pengungsi internal dan pengungsi yang tinggal di kamp-kamp untuk mendapatkan akses dasar ke kebutuhan hidup. Mereka juga mendirikan kantor di Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang akan bermanfaat bagi semua pengungsi, tanpa memandang latarbelakang Etnis. (Agustin, 2016)

Bantuan-bantuan dari OKI sampai sekarang terus di usahakan agar membuat situasi di Myanmar menjadi lebih kondusif bersama dengan negara-negara anggota lainnya, namun tidak semua keinginan dari OKI dapat diwujudkan dengan mudah hambatan yang datang membuat OKI harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar untuk Rohingya, adapun hambatan-hambatan yang dihadapi :

1. Hambatan yang pertama adalah OKI saat mengunjungi Myanmar disambut dengan demo besar-besaran di Myanmar, dan juga organisasi internasional lain dan NGO atas nama kemanusiaan pun ikut sulit masuk ke wilayah Myanmar
2. Penolakan terhadap pembangunan kantor kemanusiaan yang ingin dibangun OKI di Myanmar dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan Rakhine
3. Kunjungan dan bantuan OKI dianggap menyebarkan ajaran Islam di Rakhine, kemudian adanya asumi bahwa OKI hanya berpihak kepada Rohingya saja. Walaupun dihadapkan berbagai hambatan namun OKI

telah berupaya berperan pada konflik Rakhine-Rohingya ini dengan baik. OKI telah berusaha menjadi inisiator, fasilitator, dan mediator dengan baik. (Dewinta, 2016, hal. 132-133)

Walaupun tujuan OKI untuk membantu Etnis Rohingya terhambat, OKI beserta negara anggotanya tidak menyerah begitu saja, mereka tetap memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan tetap berusaha membantu hingga saat ini.

3. **Bantuan Turki melalui lembaga *Non-Goverment* (NGO) IHH *(Insani Yardim Vakfi)***

IHH atau Insani Yardim Vakfi ini merupakan LSM yang berasal dari Turki dan diketuai oleh Fehmi Bulent Yildirim. IHH didirikan pada tahun 1992 yang berawal dari kepedulian masyarakat muslim di Turki ketika perang Bosnia, lembaga ini kemudian berkembang pesat dan melakukan banyak sekali terobosan dan aksi kemanusiaan di berbagai negara. Diusianya yang sekarang, IHH menklaim telah melakukan aksi kemanusiaan di 140 negara dan didukung oleh 500 staff propesional. Mereka juga mengelolah dana publik sebesar 500.000.000 Turkish Lira atau sebesar 2,3 Triliun Rupiah pertahun. Jumlah yang lumayan banyak untuk ukuran sebuah lembaga kemanusiaan yang sumber dayanya dari kedermawanan masyarakat

Huseyn Oruc adalah vice president IHH, Oruc menyampaikan pada dasarnya IHH dibangun atas 3 pilar. Relief sebagai landasan pertama dari aksi IHH, dimana seluruh gerakan IHH adalah misi kemanusiaan yang universal. Oruc mengatakan tidaklah penting seberapa besar yang kita berikan untuk korban korban kemanusiaan tersebut yang lebih penting adalah kehadiran kita yang

menjadi pelipur duka mereka apalagi saat ini sebagian besar kalau tak ingin mengatakan hampir semua konflik kemanusiaan dan perang sipil terjadi di negara negara muslim, pastilah ummat islam juga yang menjadi korbannya. Inilah yang menggelorakan IHH hadir di setiap sudut sudut konflik dan derita muslim minoritas yang jauh dari jangkauan.

Pilar kedua adalah Advokasi dan *Human Rights*. Yang diperlukan dalam jangka panjang sejatinya adalah membantu menyuarakan kepentingan korban konflik untuk membuka mata dunia agar kebebasan dan lepas dari penderitaan hadir di tengah tengah mereka. Oruc mengatakan : "Kita perlu bersuara tentang Palestina, Syiria, Afrika Tengah, Rohingya, Pattani, dan nasib Bangsa Moro, bukan sekedar memberi mereka makanan dan selimut di musim dingin"

Pilar terakhir adalah *Humanitarian Diplomacy* (Diplomasi kemanusiaan). Lembaga-lembaga kemanusiaan Islam harus terlibat bukan hanya merespon keadaan pasca kejadian di tingkat akar rumput tapi juga seharusnya memainkan peranan penting sesuai titah dalam Al Qur'an, *ummatan wasathan* (wasit, penyaksi, pendamai). Peran *Peace Building* lembaga lembaga kemanusiaan masih minim dirasakan, entah karena merasa disitu adalah peran Negara atau karena memang belum sampai kapasitasnya. (Abilawa, 2015)

IHH adalah yayasan Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan yang berbasis di Istanbul. Telah terlibat dalam misi bantuan di Pakistan, Ethiopia, Lebanon, Indonesia, Irak, Palestina, Sudan, Somalia, Ghana, Mongolia, China, Brasil, Argentina, dan tempat-tempat lain. Organisasi ini aktif di Turki, Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Kaukasus. Status

konsultatif khusus sebagai LSM (lembaga swadaya masyarakat) diberikan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak tahun 2004.

Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH telah berhasil menyampaikan sumbangan atas nama warga Turki kepada bangsa Rohingya (Arakan) Muslim di Myanmar. IHH Turki memberikan bantuan selama enam bulan, bantuan pangan yang diberikan kepada 4.000 keluarga, dan 20.000 selimut diberikan. Sumbangan tersebut dikirim ke Arakan, bagi mereka yang tinggal di desa-desa yang dikuasai polisi, atau kamp-kamp, di mana mereka berlindung setelah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Anggota Yayasan IHH juga mengunjungi klinik kesehatan, yang dibangun oleh IHH. (Muslimdaily, 2014)

Organisasi kemanusiaan internasional telah menyalurkan bantuan untuk Muslim Rohingya di Aceh senilai 30 ribu euro (sekitar Rp 432 juta). Menurut Ketua Departemen Anak Yatim IHH, Resat Baser, nilai bantuan itu akan ditambah lebih besar lagi. Resat mengatakan, LSM asal Turki ini ingin membantu semua para pengungsi Rohingya di Aceh. Selama ini mereka telah bergerak di sejumlah titik pengungsian Rohingya; Aceh Timur, Aceh Utara, dan Langsa. (Akbar & Syakur, 2015)

Pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia internasional (UNHCR) dan seluruh umat muslim di dunia, semakin hari pembantaian yang terjadi membuat Rohingya semakin tersudut, dan hal ini menyebabkan pengungsi semakin banyak dan bertebaran untuk menyelamatkan diri.

Tahap pertama terdapar di perairan Aceh Utara dengan jumlah 576 orang, tahap kedua dipebuhan Kuala Langsa sebanyak 682 orang, tahap ketiga di perairan Aceh Tamiang berjumlah 47 orang dan tahap ke empat di perarain Aceh Timur sebanyak 433 Orang. Sehingga ini juga yang menarik perhatian lembaga kemanuasiaan IHH Turkey untuk turut membantu para pengungsi Rohingya di Aceh. Pada tahun 2015 PKPU Aceh bersama dengan IHH *(Insani Yardim Vakfi)* Lembaga Kemanusiaan Internasional yang berpusat di Turki, kembali menyalurkan bantuan untuk Rohingya. Lokasi bantuan yang dituju adalah pengungsi di desa Bayeun, kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur. Bantuan berupa Hygiene Kit, Selimut, Perlengkapan Ibadah dan pemberian makan dengan daging sapi yang sudah di olah. (Sukismo, 2015)

Pada tahun 2016 IHH Humanitarian Relief Foundation kembali memberikan bantuan untuk pengungsi Rohingya yang menempati *Integrated Community Shelter* (CS) Blang Adoe, Aceh Utara. Penyerahan bantuan bahan makanan untuk bulan Ramadan itu juga diperuntukkan bagi beberapa keluarga yang kurang mampu dari desa setempat. Lembaga IHH yang merupakan salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di Turki, merupakan donatur yang rutin mengirimkan bantuan untuk Rohingya di Aceh. Lembaga IHH juga menggandeng lembaga kemanusiaan Indonesia, Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai mitra. (TAM, 2016)